

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak (06/03/20) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan dari Joko Agus Setyono, SE., Ak., CSFA, CPA., CA. yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Hery Ridwan, SE., MM., Ak., CSFA, CA. di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Hadir dalam acara ini Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D.; Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Dori Santosa, SE., MM., CSFA; Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI, Dr. Heru Kreshna Reza, CSFA, dan seluruh Kepala Perwakilan dan pejabat dari lingkup AKN VI BPK RI. Acara ini juga mengundang Forkompimda tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan segenap pemerintah daerah di Kalimantan Barat, baik Gubernur, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD.

Pada acara ini, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D. berkesempatan untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D. menyatakan bahwa kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi dalam suatu organisasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan mengembangkan profesionalisme organisasi. Beliau menyatakan bahwa kegiatan serah terima jabatan pada hari ini merupakan bukti bahwa BPK terus berusaha mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Beliau juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Joko Agus Setyono, SE., Ak., CSFA, CPA., CA. atas kontribusi terbaiknya untuk BPK selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dan berharap dengan jabatan barunya sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur kinerja dan sumbangan pemikirannya dalam manajemen pemeriksaan internal dapat terus ditingkatkan.

Kepada Saudara Hery Ridwan yang menggantikan Saudara Joko Agus Setyono, beliau berpesan untuk dapat meneruskan program-program yang selama ini telah dirintis oleh pejabat sebelumnya di Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dengan baik.

Beliau menyatakan bahwa kehadiran BPK Provinsi Kalimantan Barat merupakan

wujud amanah UUD 1945 pasal 23 G dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dengan keberadaan tersebut, diharapkan lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaannya sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dapat terwujud.

Dengan adanya Perwakilan BPK di Kalimantan Barat, pimpinan BPK memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan agar tercipta hubungan kerja yang baik sesuai dengan fungsinya masing-masing antara BPK dengan penanggung jawab entitas di daerah atau wilayah setempat dalam rangka meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan ini, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Barat berhasil menjaga kualitas laporan keuangan yang tercermin pada perolehan opini WTP. Untuk diketahui, pada tahun 2019 ada 11 Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP. Beliau berharap opini WTP yang diperoleh hendaknya berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar berdayaguna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat. Keberhasilan tersebut dapat diukur dari rendahnya jumlah masyarakat miskin dan tingkat pengangguran, tingginya indeks pembangunan manusia (IPM), dan menyempitnya *gini ratio*. Data BPS Kalimantan Barat menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kalimantan Barat pada Tahun 2019 adalah sebesar 4.45%, sedangkan Tahun 2018 sebesar 4.26% atau mengalami kenaikan sebesar 0.19%. PDRB per kapita Tahun 2019 sebesar 41,88 milyar rupiah, sedangkan Tahun 2018 sebesar 38,83 milyar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 3,05 milyar rupiah. Gini Ratio Tahun 2019 sebesar 0,327, sedangkan Tahun 2018 sebesar 0,340 atau mengalami penurunan sebesar 0,013. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019 sebesar 67,65, sedangkan Tahun 2018 sebesar 66,98 atau mengalami kenaikan sebesar 0,67. Jumlah penduduk miskin Tahun 2019 sebesar 378,41 ribu jiwa, sedangkan Tahun 2018 sebesar 387,08 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 8,67 ribu jiwa.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D. menghimbau kepada saudara-saudara Kepala Daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi dapat memenuhi unsur menyejahterakan rakyat. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beliau juga mengharapkan

dukungan Kepala Daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah terhadap kelancaran proses pemeriksaan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Pada akhir sambutannya, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D. berpesan agar dengan dilakukannya serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dari pejabat lama ke pejabat yang baru, akan membawa kita semua kepada kehidupan yang lebih baik serta dapat terus membina komunikasi yang baik dengan seluruh satuan kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan, kepada para pemangku kepentingan BPK di Provinsi, Kabupaten, maupun Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, beliau juga tetap mengharapkan komunikasi dan kerjasama yang telah berlangsung dengan baik, dapat terus dipelihara. Hal ini semata-mata untuk dapat mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara/Daerah, yang transparan dan akuntabel, khususnya di pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Barat, yang pemeriksaan keuangannya diamanahkan kepada beliau selaku Anggota VI BPK.

SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR